BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang (*rahmatal lil alamin*) sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia sepanjang zaman. Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka dari itu tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi.¹ Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa dipisahkan dengan namanya perjanjian (akad). Perjanjian mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.

Lembaga keuangan merupakan penyempurna adalah lembaga keuangan yang menggunakan sistem keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah sendiri didukung oleh salah satu produk yang banyak diminati masyarakat yakni *murabahah*. Dari data yang ada pada saat ini transaksi jual beli *murabahah* merupakan yang paling dominan dijalankan oleh Bank Umum Syariah, Cabang Syariah Bank Konvensional atau Unit Usaha Syariah dan Bank Penkreditan Rakyat Syariah. Dominannya transaksi *murabahah* tersebut akan membuat semua pihak gembira, jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Dominannya transaksi *murabahah* tersebut membawa implikasi yang sangat signifikan yaitu

¹ Adiwarman A Karim I, Bank Islam dan Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

timbulnya paradigma bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, karena transaksi *murabahah* dilaksanakan masih jauh dari prinsip-prinsip yang ada. *Murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah dalam bekerjasama dengan nasabah. Secara bahasa *murabahah* adalah bentuk *mutual* (saling) dari kata *ribh* yang artinya keuntungan, yakni penambahan nilai modal atau saling memberikan keuntungan.

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tangguh dan cicilan. Tapi kebanyakan nasabah menggunakan cara pembayaran dengan cicilan. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Setelah semua kesepakatan terjadi maka akad *murabahah* sudah terjadi. Dalam akad *murabahah* mempunyai resiko yang cukup besar yakni ketika ada nasabah yang tidak bisa membayarkan angsuran tepat waktu atau bahkan usaha mereka yang tidak selamanya memperoleh laba atau keuntungan sesuai dengan yang diinginkan. Ada kalanya debitur mengalami kebangkrutan atau kerugian, bahkan ada debitur yang sengaja menunda-nunda pembayaran tanpa adanya alasan yang jelas. Dari situlah terjadi permasalahan atau sengketa antara debitur dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam hukum perjanjian ada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Kebebasan berkontrak mengandung arti bahwa para pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyelesaian secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi.

Masing-masing mempunyai keunggulan dan kekurangan. Namun, dalam dunia bisnis, penyelesaian sengketa nonlitigasi lebih menjadi pilihan dari para pelaku bisnis.² Maka alternatif penyelesaian sengketa dalam perikatan atau perjanjian syariah yang bisa digunakan adalah melalui mekanisme Musyawarah, Mediasi (*Ishlah/Sulh/Perdamaian*), Arbitrase (*al-Tahkim*), dan Pengadilan (*al-Qadha*).

Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera yang beralamatkan di Kediri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah membuka pengajuan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan sistem MoU (*Memorandum of Understanding*) antara pihak koperasi dengan pihak instansi yaitu kepala sekolah, kepala dinas atau kepala instansi dikoordinir bendahara dengan sistem potong gaji jaminan ijazah pendidikan terakhir untuk pembiayaan 10 juta untuk PNS sesuai dengan golongan pegawai dan 5 juta untuk non PNS atau pegawai instansi swasta. Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera dalam prosedur pembiayaan sudah sesuai dengan hukum Islam, sudah membuat perjanjian kepada nasabah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum perjanjian, walaupun pada praktiknya pembiayaan akad *murabahah* ini tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti pihak koperasi yang seharusnya menyediakan dana dan barang yang di inginkan nasabah, namun kenyataannya koperasi tidak bisa menyediakan barang yang di inginkan nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri barang yang inginkan dan hanya menyediakan dananya saja kemudian barang yang disepakati dalam perjanjian dengan kenyataan yang di inginkan nasabah itu tidak sesuai, bahkan pihak koperasi

² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 251.

tidak mengetahui barang yang akan dibeli nasabah. Selain itu pada saat mengangsur pembiayaan, pada angsuran pertama, dan kedua masih lancar, namun pada saat angsuran ketiga dan selanjutnya, nasabah sudah banyak yang molor. Dari pihak koperasi sendiri dalam menyelesaikan debitur gagal bayar yakni penagihan ke instansi tempat nasabah bekerja, yang pertama menemui bendahara instansi namun jika bendahara tidak ada respon, maka langkah selanjutnya menagih ke nasabah, kemudian penyelesaian yang kedua yakni penjadwalan kembali (*rescedulling*) yaitu memberikan keringanan berupa mengubah jangka waktu dari 3 tahun kemudian di *reschedule* 4 menjadi tahun, kemudian penyelesaian yang ketiga yakni persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan jumlah angsuran sesuai kemampuan nasabah yang tidak mengganggu finansial setiap bulannya. Namun dari penyelesaian debitur gagal bayar diatas dianggap belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri seperti halnya masih banyak nasabah yang mengalami kemacetan. Yaitu dari 306 nasabah, sebesar 210 nasabah mengalami gagal bayar dengan kategori kurang lancar sebesar 29 nasabah, diragukan 1 nasabah, dan macet sebesar 180 nasabah.³

Dari uraian diatas peneliti mencoba menguraikan permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih pemikiran hasil dari penelitian dengan mengangkat sebuah judul **“Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad *Murabahah* Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)”**

³ Observasi, di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera Kediri, 25 September 2017.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera?
2. Bagaimanakah penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera perspektif Hukum Perikatan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab debitur mengalami gagal bayar dan bentuk penyelesaiannya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak Koperasi Tunas Sejahtera sehubungan dengan debitur gagal bayar ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan Islam. Dimana kajian ini, dapat digunakan untuk menganalisis analisis penyelesaian debitur gagal bayar dalam akad-akad pembiayaan syariah.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi lembaga

Untuk memperoleh pengetahuan mengenai bentuk penyelesaian bagi koperasi dalam akad *murabahah*

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang akan mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah jika nanti ada ada debitur yang gagal bayar dalam akad *murabahah*.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan penyelesaian debitur gagal bayar di lembaga keuangan syariah.

d. Bagi peneliti yang akan datang

Sebagai bahan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam penelitian yang sama tentang akad *murabahah* di lembaga keuangan syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian yang pertama mengenai akad *murabahah* dalam perspektif hukum perikatan Islam, namun mengenai analisis penyelesaian debitur gagal bayar dalam akad *murabahah* perspektif hukum perikatan Islam disini , masih belum banyak ditemukan.

Adapun penelitian terdahulu mengenai penyelesaian debitur gagal bayar dalam akad *murabahah* perspektif hukum perikatan Islam:

1. Pada skripsi Indah Imania Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri tahun 2014 dengan judul “Strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Menurunkan *Resiko Non Performing Financing* (NPF) Ditinjau dari Ekonomi Syariah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri” yang mana pada skripsi ini Indah Imania menganalisis pembiayaan yang mengakibatkan resiko kegagalan. Kesalahan dalam pemberian pembiayaan dapat mengakibatkan dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Semakin tinggi NPF kinerja bank semakin buruk dan profitabilitasnya rendah. Oleh karena itu diperlukan strategi dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut yang bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan PT BPRS Tanmiya Artha Kediri untuk menurunkan NPF ditinjau dari ekonomi syariah. Strategi menurunkan NPF Di BPRS Tanmiya Artha Kediri dilakukan melalui analisa pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Analisa pembiayaan dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara kekeluargaan, restrukturisasi pembiayaan, penyitaan barang jaminan, hapus buku, dan tidak membatasi realisasi pembiayaan. Berdasarkan analisis data penelitian, BPRS Tanmiya Artha sudah menerapkan strategi strategi

menurunkan NPF yang sesuai dengan peraturan perbankan yang ada dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah tema yaitu pembiayaan yang mengalami kegagalan, dalam membayar, membahas tentang NPF (*Non Performing Financing*), Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara kekeluargaan, restrukturisasi pembiayaan sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan membahas tentang penanganan. Tidak membahas alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian debitur gagal bayar dalam perspektif hukum perikatan Islam seperti melalui mekanisme mediasi, arbitrase, dan pengadilan.⁴

2. Pada skripsi Nurul Aini Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri tahun 2013 dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Cabang Nganjuk” yang mana pada skripsi ini Nurul Aini menganalisis pencegahan terhadap risiko yang akan datang, yang tidak akan diprediksi sebelumnya oleh manusia, maka diperlukan manajemen risiko sebagai jalan keluar atau meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Konsep manajemen risiko ditetapkan dari awal dengan tujuan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan bermasalah dimana penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Beringharjo Cabang Nganjuk ini diawali dengan mengidentifikasi, pengklasifikasian nasabah, penanganan, evaluasi, dan hapus buku. Implementasi manajemen risiko di BMT Beringharjo Cabang

⁴Indah Imania, *Strategi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Untuk Menurunkan Resiko Non Performing Financing (NPF) Ditinjau dari Ekonomi Syariah di PT BPRS Tanmiya Artha Kediri*, Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, STAIN Kediri, tahun 2014.

Nganjuk untuk mengatasi pembiayaan bermasalah sesuai dengan tingkat risiko yang dialami oleh nasabah yang bersangkutan antara lain melalui pendampingan, perpanjangan waktu pengembalian, pemberian surat pemberitahuan, surat peringatan I, II, dan III dan sita jaminan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah pada tema yang dibahas dan membahas tentang manajemen resiko, sedangkan perbedaannya Tidak membahas alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian debitur gagal bayar dalam perspektif hukum perikatan Islam.⁵

3. Pada skripsi Muh Sofyan Assauri Mahasiswa Progrma Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAIN Kediri tahun 2017 dengan judul “Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri” yang mana pada skripsi ini Muh Sofyan Assauri menganalisis pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan prinsip 6C guna meminimalisir pembiayaan bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri adalah *character, capacity, capital, condition, collateral, constrains*. Namun pada praktiknya BPR lebih mengutamakan pada analisis *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (agunan) yang dinilai melalui pendapatan usaha yang diperoleh setiap bulannya dan kelayakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah. Selain itu, menerapkan ketentuan mengenai BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan) dan adanya pengawasan. (2) masalah-masalah yang timbul dalam penerapan 6C

⁵Nurul Aini, *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Beringharjo Cabang Nganjuk*, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, STAIN Kediri, tahun 2013.

pada pembiayaan Murabahah di BPRS Syariah Tanmiya Artha Kediri, serta kebijakan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah masih adanya manipulasi informasi dari calon nasabah, Prinsip 6C hanya dianggap formalitas oleh calon nasabah. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah: *Preventive Control of Financing*, pemantauan terhadap calon nasabah, *Repressive Control of Financing*.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah pada tema, kemudian juga membahas tentang akad murabahah, kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dan ada nasabah yang memanipulasi informasi, Sedangkan perbedaannya Tidak membahas alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian debitur gagal bayar dalam perspektif hukum perikatan Islam seperti musyawarah, mediasi, arbitrase maupun pengadilan.⁶

4. Pada skripsi Yuli Artiningsih Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan judul “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta” yang mana pada skripsi ini Yuli Artiningsih menganalisis peranan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BTN Syariah cabang Yogyakarta utamanya adalah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip 5C (*character, capability, capital, collateral, dan condition of economy*). Penilaian *character* bertujuan untuk mengetahui watak dan kepribadian calon debitur, penilaian *capability* yakni untuk mengetahui kemampuan calon

⁶Muh Sofyan Assauri, *Efektifitas Penerapan Prinsip 6C pada Analisis Pembiayaan Murabahah Guna Mengantisipasi Pembiayaan Bermasalah di BPR Syariah Tanmiya Artha Kediri*, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, STAIN Kediri, tahun 2017.

debitur untuk membayar pembiayaan. Kemudian *capital* untuk mengetahui besarnya modal yang dimiliki oleh calon debitur. Penilaian *collateral* yakni untuk mengetahui nilai jaminan yang disertakan sebagai sumber pembayaran kedua. Penilaian *condition of economy* untuk mengetahui kondisi yang berkaitan langsung dengan prospek calon debitur ke depannya.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti saat ini adalah pada tema tentang pembiayaan bermasalah sedangkan perbedaannya Tidak membahas alternatif penyelesaian sengketa penyelesaian debitur gagal bayar dalam perspektif hukum perikatan Islam seperti musyawarah, mediasi, arbitrase maupun pengadilan.⁷

Berdasarkan hal diatas, menurut peneliti belum pernah ada penelitian yang membahas tentang dua hal, pertama: penyebab debitur mengalami gagal bayar dan bentuk penyelesaiannya, kedua penyelesaian debitur gagal bayar di Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Sejahtera perspektif Hukum Perikatan Islam. Atas dasar itulah penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “*Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)*”

⁷Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2016.